**SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PIDOTA DI DESA DADAKITAN**

**Oleh**

**Trisna1), Yuliana2), Septia Rahayu3)**

**1,2,3Universitas Madako, Tolitoli, Indonesia**

**E-mail: 1****trisna.se.2608@gmail.com****, 2****yulnarahman@gmail.com****, 3****septiarahayu090900@gmail.com**

 Abstract

The purpose of this study was to determine the Financial Reporting System of Pidota Village Owned Enterprises (BUMDes) in Dadakitan Village. This type of qualitative research, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation, data analysis techniques used are descriptive analysis such as data collection, data selection and reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Pidota Village-Owned Enterprise Financial Reporting System (BUMDes) in Dadakitan Village is in accordance with or not in accordance with the financial reporting standards set by the Tolitoli Regency Community and Village Empowerment Service, especially those dealing with BUMDes.

**Keywords: Financial Reports And SOPs For Making BUMDes Financial Reports**

**PENDAHULUAN**

Pedesaan merupakan sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional, oleh karna itu daerah diharapkan lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menciptkan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan asli desa. Otonomi yang kemudian memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah yang menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersediannya sumber daya yang belum dimanfaatkan dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa sejatinya merupakan salah satu entitas mandiri yang keberadaannya dibawah pengawasan pemerintah daerah kabupaten yang disebut dengan pemerintah daerah. Kepala Desa sebagai komisaris utama yang bertanggung jawab penuh terhadap Kinerja BUMDes. Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Permendes PDTT No.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatakan pendapatan asli daerah. Laporan Keuangan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pengelola BUMDes selama satu periode. Laporan keuangan pengelola BUMDes diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar laporan keuangan lebih *accountable* dan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa desa harus memiliki badan usahanya sendiri untuk menunjang perekonomian desa, maka desa Dadakitan telah mendirikan badan usaha milik desa pada tanggal 18 Januari 2016 dan diberikan nama BUMDes Pidota. BUMdes Pidota merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Dadakitan yang diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. BUMDes Pidota didirikan oleh desa Dadakitan tidak lain ialah agar seluruh aspirasi dari masyarakat dapat ditampung sehingga dapat membantu desa dalam meningatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun social.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pidota merupakan badan usaha yang memiliki arti “Kebaikan Untuk Kita Semua”, arti kata ini diambil dari kata “Pidota” yang berasal dari Bahasa Tolitoli yang mengartikan bahwa BUMDes ini didirikan untuk kebaikan kita semua atau untuk kebaikan seluruh masyarakat Desa Dadakitan. BUMDes Pidota merupakan Bumdes yang sudah 5 tahun berdiri dan telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian pengurus.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pidota sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan dapat dilihat dari unit usaha BUMdes yang didirikan, unit usaha BUMDes Pidota telah memiliki 4 (empat) unit usahanya sendiri yakni Waserda (warung serba ada), Wi-Fi BUMdes, pengelolaan air bersih dan penyewaan kursi dan tenda. Beberapa unit usaha ini yang mengharuskan BUMDes pidota untuk membuat pertanggungjawabannya yang berupa laporan keuangan per triwuan maupun pertahun dan akan dilaporkan kepada kepala desa sebagai komisaris utama dalam BUMDes dan kepada pengawas BUMdes yang ada di desa Dadakitan

BUMDes Pidota sistem pencatatan keuangannya di mulai dari transaksi awal dana diberikan yang bersumber dari dana desa dimulai dari pencatatan buku bank kemudian dicatat dalam buku kas umum, dari buku kas umum kemudian disalurkan kepada masing-masing unit usaha diantaranya adalah waserda, wi-fi, penyewaan tenda dan kursi dan juga penagihan air bersih. Dari ke empat unit usaha ini yang nantinya dilanjutkan kepada pembuatan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Pidota hanyalah laporan arus kas, laba rugi dan neraca, seharusnya BUMDes Pidota membuat laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Ikatan Akuntasi Indonesia (2012:2) yang mneyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, arus kas,perubahan ekuitas, neraca dam juga catatan atas laporan keuangan. Ketidakefisinan ini kemungkinan besar erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman dan kurangnya pelatihan yang diterima oleh pengelola BUMDes Pidota, mengingat jugabahwa memang ketua BUMDes Pidota merupakan seorang mahasiswa perikanan yang memang bukanlah memiliki bidang keilmuan akuntansi/ekonomi. Itulah sehingga perlunya diadakan pelatihan khusus untuk pengelola BUMDes serta bimbingan lebih lanjut mengenai laporan keuangan oleh dinas terkait. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pidota di Desa Dadakitan

**KAJIANTEORI**

1. **Pengertian dan Otonomi Desa**

Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 mengenai ketentuan umum, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

1. **Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 : Pasal 1).

1. **Landasan Hukum Badan saha Milik Desa (Bumdes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola berdasarkan pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Dalam Permendesa Nomro 4 Tahun 2015 terdapat beberapa pasal terkait diantaranya adalah Pasal 1 Ayat 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, danPasal 23.

1. **Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Prinsip dalam mengelola bumdes menjadi hal yang penting untuk diuraikan agar dapat dipahamidan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pihak-pihak seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, BPD dan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes antara lain:

1. Kooperatif, adanya partisipasi dari seluruh komponen dalam pengelolaan BUMDes serta mampu bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif, keterlibatan seluruh komponen dalam memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk meningkatkan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, seluruh komponen diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku maupun agama.
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus bersifat terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan yang dilakukan.
5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknik maupun administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Sutainable, kegiatan usaha ada pada bumdes dapat berkembang dan terus berlanjut.
7. **Siklus Akuntansi**

Menurut Bahri (2016 : 18) siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Berikut adalah tahapan dalam siklus akuntansi:

1. Bukti transaksi (mengidentifikasi dan menganalisis transaksi)
2. Pencatatan transaksi dalam jurnal
3. Posting buku besar
4. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian
5. Laporan keuangan
6. Jurnal penutup
7. **Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama kegiatan ekonomi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Agar pembaca laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang jelas, laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

1. **Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012 : 5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi harus terdapat empat karakteristik:

1. Dapat dipahami. Kulaitas penting informasi yang ditampung dalamlaporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat diasumsikan oleh pemakai.
2. Relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan yang menegaskan (*predictive*)dan penegasan *(confirmatory*) berkaitan satu sama lain.
3. Keandalan. Informasi juga harus andal *(reliable*) yang memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat di baca dengan jelas agar dapat mudah untuk dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta dapat digunakan sebagai evaluasi posisi keuangan secara relatif.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dadakitan, Dinas DPMD (khususnya bidan ekonomi), Ketua BPD, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUMDes Desa, Ketua (BUMdes) dan Bendahara BUMdes Pidota Desa Dadakitan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataprimer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam terhadap responden/informan dan permintaan dokumen pendukung lainnya.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknikanalisa data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018 : 245) adalahpengumpulan data, reduksi data, penyajian data danreduksi data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Sistem pelaporan keuangan BUMDes**

Badan usaha milik desa (BUMDes) Pidota melakukan pencatatan dari awal dana diberikan dan digunakan sebagai pengelolaan unit usaha dan kemudian dibuatkan dalam laporan keuangan, semua proses ini dijalankan sebagaimana mestinya guna untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor. 1 Tahun 2015) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian badan usaha milik desa (BUMDes) Pidota telah melakukan pencatatan yang semestinya dilakukan hanya sajadalam pembuatan laporan keuangannya masih terdapat banyak kekeliruan yang memperlihatkan bahwa walaupun telah melakukan pencatatan namum tidak memahami isi dari laporan yang dibuat maka laporan tersebut tidaklah memadai untuk diberikan kepada pengguna dan pembaca laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat juga tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh DPMD yang menangani mengenai BUMDes di Kab. Tolitoli.

Adapun sistem yang harus dilakukan dalam membuat laporan keuangan diantaranya adalah : bukti transaksi (mengidentifikasi dan menganalisis transaksi), jurnal, buku besar, neraca saldo dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup (Syaiful Bahri 2016:18). Sedangkan badan usaha milik desa (BUMDes) Pidota desa Dadakitan hanya melakukan pencatatan berupa transaksi yang langsung dicatat pada buku kas umum dan tidak membuat pencatatan di buku besar. Setelah melalui buku kas kemudian mereka langsung menyalurkan dana kepada masing-masing unit usaha yang kemudian mereka buat dalam pencatatan buku unit usaha secara langsung.

Adapun unit usaha yang dijalankan BUMDes Pidota adalah Waserda (warung serba ada), Wi-fi, penyewaan tenda dan kursi, dan air bersih. Pada unit usaha waserda pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan perhari yang didapat dari hasil penjual setiap harinya. Untuk unit usaha Wi-fi pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan perbulan. Untuk unit usaha tenda dan kursi merupakan unit usaha yangbekerja sama dengan Karang Taruna, kadangkala unit usaha ini pengelolaannya kurang efisien karena ketidakkonsistenan pengurus dalam menjalankan kegiatan berupa penyewaan yang tidak berlaku sebagaimana mestinya. Semua unit usaha BUMDes Pidota ini memiliki pengelola yang berbeda-beda untuk menangani pembukuannya.

Berdasarkan sistem pencatatan BUMDes Pidota diatas dan dibandingkan dengan siklus Akuntansi yang sebenarnya berdasarkan Syaiful Bahri (2016:18) yang menyatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari bukti transaksi (mengidentifikasi dan menganalisis transaksi), jurnal, buku besar, neraca saldo dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, maka sistem pencatatan yang dilakukan BUMDes Pidota dapat dinyatakan belum sesuai.

1. **Karakteristik Laporan Keuangan**

StandarAkuntansiKeuangan (SAK) Tahun 2017 : 5-8, karakteristik laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai merupakan kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan, yang artinya pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan/keinginan untuk mempelajari dengan ketekunan yang wajar. Dengan demikian laporan keuangan BUMDes Pidota belum dapat dikatakan mudah untuk dipahami karena dalam pembuatannya saja mereka masih belum memahami apa isi dari laporantersebut apalagi dengan pembaca dan pemakainya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2017 : 5-8, karakteristik laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan BUMDes Pidota memiliki karakteristik relevan karena telah memasukan segala sesuatu yang sifatnya berhubungan satu sama lain dan dengan sebenarnya-benarnya.

Membuat laporan keuangan yang bersifat akurat tidaklah sulit jika dibuat berdasarkan data yang nyata sesuai dengan realita yang terjadi BUMDes Pidota telah membuat laporan keuangan yang lengkap menurut mereka karena telah memasukkan seluruh transaksi-transaksi yang sebenarnya terjadi dalam proses kegiatan unit usaha berjalan, namun kadangkala sumber daya manusia sebagai pengelola yang menjadi hambatan dari proses kegiatan. Laporan yang dibuat adalah laporan yang nyata berdasarkan apa yang terjadi dan tidak ada paksaan atau arahan dari pihak manapun.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2017 : 5-8, karakteristik laporankeuangan dapat diandalkan jika kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat bergantung pada kebenaran infromasi yang disajikan. Keandalan suatu informasi tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (tidak direkayasa) yang tersaji dalam laporan keuangan oleh manajemen.

Laporan keuangan BUMDes Pidota blum dikatakan dapat diandalkan karena berdasarkan isi dari laporan tersebut masih banyak kekeliruan dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hal tersebut, terlebih lagi dalam pembuatannya mereka hanya sekedar membuat (meraba-raba). Selain itu sumber daya manusia di BUMDes Pidota sebagai pengelola juga menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan apakah dalam pembuatan laporan keuangan, namun dengan ketidak fokusan dan kurangnya pengetahuan pengelola membuat beberapa data-data tidak dimasukkan, padahal seharusnya dimasukkan untuk menjadi isi dari laporan. Oleh sebab itulah salah satu karakteristik dari laporan keuangan ini belum bisa dicapai oleh BUMDes Pidota.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2017 : 5-8, karakteristik laporan keuangan dapat dibandingkan bila informasi yang disajikan dapat saling diperbandingkan seperti antar periode maupun antar perusahaan. Laporan keuangan mempunyai peranan penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat dibutuhkan pihak-pihak yang berkepentingan.

BUMDes Pidota dalam membuat laporan keuangan telah memasukkan pendapatan unit usaha perbulannya yang membuat mereka dapat mengambil keputusan dan membandingkan apakah setiap unit usaha mengalami kemajuan atau tidak. Namun berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan laporan keuangan BUMDes Pidota ini belumlah memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat dibandingkan karena akan tidak efisien pembandingan antar periode maupun dengan perusahaan lain jika inti dari laporan yaitu isinya tidaklah memadai.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan tentang sistem pelaporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) Pidota Desa Dadakitan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan yang dilakukan BUMDes Pidota (siklus akuntansi)/sistem dinyatakan belum sesuai dengan pencatatan yang sebenarnya harus dibuat. Serta pembuatan laporan keuangan BUMDes Pidota tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh DPMD yang menangai mengenai BUMDes di Kab. Tolitoli. Kurangnya pemahaman mengenai pembuatan laporan keuangan sehingga membuat masih banyaknya kekeliruan yang menyebabkan laporan keuangantersebut manjadi tidak efisien untuk disajikan kepada pembaca dan pengguna laporan keuangan.
2. Kurangnya konfirmasi dan komunikasi antara pengurs BUMDes dengan pemerintah desa dan pengawas BUMDes, serta kurangnya koordinasi antara pengurus BUMDes dengan Dinas terkait yang menangani BUMDes di Kabupaten Tolitoli.
3. Pengurus dan pengelola unit usaha belum menjalankan tupoksinya secara maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan dan tidak fokusnya dalam melaksanakan dan menjalankan usaha yang disebabkan adanya pekerjaan lain.
4. Masih adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah desa mengenai kepengurusan yang akhirnya membuat sumber daya manusia yang dipercayakan menjadi tidak bekerja dan menjalankan tugasnya secara efektif dan efisienyang berimbas kepada pengelolaan kegiatan unit usaha dan pendapatan BUMDes

Bedasarkan hasil penelitian diharapkan Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tolitoli agar terus memberikan pelatihan dan pembinaan terkait system pelaporan keuangan BUMdes dan disarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat meneliti mengenai bagaimana pemeriksaan serta pembinaan terhadap BUMDes oleh Dinas yang terkait untuk menangani Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tolitoli.

**UcapanTerimaKasih**

Alhamdulilahir’rab’bil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta berkah-Nya yang tiada terbatas dalam menyelesaikan tulisanini. Penulis menyadari bahwa dalam peneyelesaiantulisanini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang teristimewa kedua orang tua,sahabat,teman sejawat dan kepala desa pidota, kepalaBUMDesPidota dan jajarannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Andriani, 2020, Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol”. *Skripsi*. Universitas Madako Tolitoli.
2. Astri, Fitriyah. “Analisis Perkembangan Bumdes Se Kabupaten Tolitoli. Costing : *Journal Of Economic, Business And Acounting*. 2021,4.2 : 855-863.
3. Irham Fahmi, 2012 *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi 1 Penerbit Bandung : Alfabetha
4. Kasmir, 2017 *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit, Rajawali Pers/Raja Grafindo Persada
5. Indonesia. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol, 1 No. 2 September 2020
6. Nurhazana, Endang Sri Wahyuni. “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pada Bumdes Dengan Pendekatan *Goal Model”*. *Jurnal* IAKP, Vol 1, Juni 2020. E-ISSN.2723-0309
7. Permendes Pdtt Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8 danPasal 23
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, “Pengelolaan Keuangan Desa”.
9. Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015.
10. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, “Bumdes Merupakan Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Kepemiikan Modalnya Dimiliki Oleh Desa”.
11. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, “Desa Disarankan Untuk Memiliki Badan Usaha Yang Berguna Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat”.
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Pengertian Desa”.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN